



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
JL. TUGU NO. 1 MALANG

MALANGKUCECWARA  
BERMARTABAT



**S A M B U T A N   D A N   A R A H A N**

# **PEMBINAAN DAN PEMBEKALAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN 2020**

**SUTIAJI   WALIKOTA MALANG**



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang

# VISI 2018-2023

# KOTA MALANG BERMARTABAT

PERDA 1/2019 | RPJMD KOTA MALANG 2018-2023



“  
**Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan**”

Sepanjang 104 tahun usianya, Kota Malang telah dipimpin oleh 11 Walikota. Walikota Malang kesebelas yang baru saja dilantik pada tanggal 24 September 2018 adalah Drs. H. Sutiaji yang didampingi Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko sebagai Wakil Walikota Malang periode 2019-2023 dan telah mencanangkan Visi Kota Malang Bermartabat. Lebih mendalam, hakikat dari bermartabat adalah sebagai perwujudan dan implementasi dari kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, kepada masyarakat yang dipimpin.

**THE  
FUTURE OF  
MALANG**



**MALANG CREATIVE**



**MALANG  
HALAL**



**MALANG  
HERITAGE**



**MALANG 4.0**



**MALANG  
NYAMAN**



**MALANG  
SERVICES**

# VISI KOTA MALANG BERMARTABAT

PERDA 1/2019 - RPJMD 2018-2023



## 4 MISI

01

**MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAYANAN DASAR LAINNYA BAGI SEMUA WARGA**

02

**MEWUJUDKAN KOTA PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KREATIF, KEBERLANJUTAN DAN KETERPADUAN**

03

**MEWUJUDKAN KOTA YANG RUKUN DAN TOLERAN BERAZASKAN KEBERAGAMAN DAN KEBERPIHAKAN TERHADAP MASY. RENTAN & GENDER**

04

**MEMASTIKAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAY. PEMERINTAH YANG TERTIB HUKUM, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL**

## 4 TUJUAN

01

### LAYANAN DASAR

Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan lay. dasar lainnya

02

### DAYA SAING EKONOMI

Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan

03

### PEMBANGUNAN INKLUSIF

Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender

04

### GOOD GOVERNANCE

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

## 12 SASARAN

**SASARAN 1 : PENDIDIKAN**

**SASARAN 2 : KESEHATAN**

**SASARAN 3 : DAYA BELI**

**SASARAN 1 : EKRAF**

**SASARAN 2 : INFRASTRUKTUR**

**SASARAN 3 : TATA RUANG & LH**

**SASARAN 1 : PERLIND. SOSIAL**

**SASARAN 2 : PEMBERDAYAAN**

**SASARAN 1 : PENEGAKAN PERDA**

**SASARAN 2 : KELEMBAGAAN**

**SASARAN 3 : MERITOKRASI**

**SASARAN 4 : PEMANFAATAN TI**



A hand holding a spear, with the hand wearing several bracelets. The spear is dark and has a long, pointed shaft.

**KECAMATAN  
& KELURAHAN**

=

**UJUNG TONJOL  
PELAYANAN PUBLIK**

**TERIMAKASIH ATAS KINERJANYA  
TERUS TINGKATKAN LAYANAN DAN PENGETAHUAN  
UNTUK HADAPI ISU STRATEGIS SAAT INI DAN MENDATANG**



## PASAL 10

- 01 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tk.kec
- 02 Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 03 Mengoordinasikan upaya penyelengg. trantibum
- 04 Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda & Perkada
- 05 Mengoordinasikan penyelengg. Kegiatan pemerintahan tk.kec
- 06 Membina dan mengawasi penyelengg. pemerintahan desa
- 07 Pelaks. urusan kewenangan daerah kab/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja OPD yang ada di Kec.



## TUGAS CAMAT

PP 17/2018

## PASAL 11

**Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota** Yakni untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

**Pelimpahan urusan tersebut terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan**

**kriteria layanan perizinan** proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi



# **TUGAS** **LURAH**

PP 17/2018

- **Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;**
- **Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;**
- **Pelaksanaan pelayanan masyarakat;**
- **Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;**
- **Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;**
- **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan**
- **Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**





# SALAH SATU ASPEK YANG PERLU PEMBENAHAN DAN PENGUATAN KAPASITAS ADALAH TERKAIT PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN SERTA ATURAN HUKUM (WARIS, KUASA WARIS DLL)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-  
POKOK AGRARIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

KUHP DAN KUHPERDATA



# Isu Strategis Pertanahan

## 01

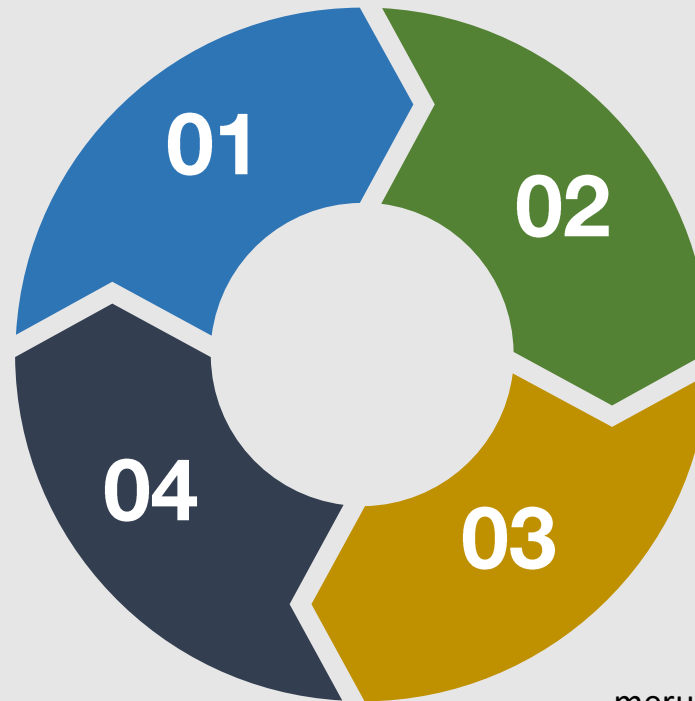
### TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH

tumpang tindih kepemilikan lahan antar masyarakat memerlukan penyelesaian cukup lama yang melibatkan pemerintah daerah dengan berbagai pihak itu. Selain itu investasi juga terkendala kepastian hukum

## 02

### DATA BASE TENTANG PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGUNAAN RUANG

Data base sangat penting untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan operasional atas suatu bidang tanah/lahan di suatu wilayah/daerah



## 03

### KAPASITAS APARATUR DALAM PEMAHAMAN HUKUM

Terbatasnya kapasitas aparatur seringkali berdampak terjadinya kasus hukum yang melibatkan aparatur bersangkutan dan atau kurang gesit nya layanan bagi masyarakat yang memerlukan informasi pertanahan.

## 04

### SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN TERMASUK REGULASI TERKAIT

Beberapa kebijakan pertanahan nasional yang merupakan isu strategis untuk dicarikan penyelesaiannya mencakup (1) kebijakan sistem pendaftaran tanah stelsel negatif; (2) redistribusi tanah; (3) penyelesaian perkara kasus pertanahan; (4) kebijakan penanganan tanah; dan (5) sumber daya manusia (SDM) bidang pertanahan





DIHARAPKAN PENINGKATAN  
PEMAHAMAN APARATUR TERKAIT  
ASPEK PERTANAHAN DAPAT  
MENGOPTIMALKAN LAYANAN DAN  
MENGHINDARKAN DARI AKIBAT  
HUKUM YANG TIDAK DIINGINKAN



# Arahan

- **Untuk menghindari Penyimpangan prosedur**, perlu menyusun dan memiliki SOP sebagai juknis, antara lain dalam penyelenggaraan pelayanan Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan atau permasalahan waris
- **Apabila terjadi situasi Penundaan berlarut**, agar diantisipasi dengan ada/terdapat batasan waktu dalam penyelenggaraan pelayanan
- **Pencegahan Penyalahgunaan wewenang dengan Pembinaan** terhadap Lurah dan Camat agar senantiasa memiliki pemahaman yang selaras dengan ketentuan dan dimutakhirkan dengan perkembangan terbaru

MALANGKUCECWARA  
BERMARTABAT



**SEKIAN DAN TERIMAKASIH**  
**SELAMAT BERTUGAS DAN MELAYANI**



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang